

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Isu Ketenagakerjaan

Pengantar diskusi oleh:

1. **Hanif Dhakiri** (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia)
2. **Ninasapti Triaswati** (Board The Indonesian Institute dan Ekonom FEB UI)
3. **Muhamad Iksan** (Redaktur Pelaksana SuaraKebebasan.org)

Moderator : Arfianto Purbolaksono, Peneliti The Indonesian Institute

Partisipan

Peserta yang hadir +/- 40 orang. Peserta dari berbagai kalangan . Dari kalangan *civil society* antara lain dari MKGR, Sabda FKUB, LKSI, Mixed Marriage, HMI, dan IASI. Dari kalangan akademisi antara lain UIN Jakarta, Universitas Paramadina, UGM, dan UI. Kemudian dari media terdiri dari viva.co.id, liputan6.com, kompas.com, fimela.com, okezone.com, dan detik.com

PEMBAHASAN

- (1) **Hanif Dhakiri**. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menilai bahwa MEA adalah bentuk konsolidasi ASEAN sebagai sebuah *region* agar kawasan Asia Tenggara mampu meningkatkan daya saingnya. Secara umum MEA menekankan pada kompetisi dan kerjasama. Daya saing menjadi kunci penting bagi Indonesia agar mampu mengambil manfaat dari pasar global, termasuk MEA. Dengan pentingnya daya saing, maka Indonesia harus menyepakati bahwa isu ketenagakerjaan adalah isu sentral yang tidak boleh dipinggirkan.

Pada saat ini rata-rata pendidikan formal Indonesia masih berada di jenjang SMP. Untuk meningkatkan level tersebut tentu membutuhkan biaya yang besar, baik dana maupun waktu. Oleh karena itu Indonesia memerlukan *shortcut* yang harus dilakukan pada saat ini. Bagi Menaker jalan pintas tersebut adalah pelatihan kerja. Dengan itu, kompetensi masyarakat dapat ditingkatkan produktivitasnya dengan waktu yang lebih singkat dapat berjalan dengan baik. Pelatihan kerja kemudian harus menjadi komitmen semua pihak, baik pemerintah, akademisi, hingga swasta. Kebijakan yang menjadi fokus bagi pemerintah saat ini adalah percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja, sertifikasi, dan pengendalian tenaga kerja asing.

Dengan diberlakukannya MEA, pasar akan terbuka dan akan meningkatkan daya saing dengan merasionalisasikan pasar. Contohnya, pada profesi X yang sebelum pasar terbuka kuantitasnya hanya sedikit. Dengan kondisi yang ada harga jasa yang mereka tawarkan saat ini sangat tinggi. Dengan dibukannya keran globalisasi, maka harga jasa yang ditawarkan tersebut dapat diseimbangkan melalui mekanisme pasar.

Lembaga sertifikasi, mekanisme sertifikasi, dan assessor juga sangat diperlukan oleh semua profesi. Untuk itu pemerintah mendorong seluruh sektor pekerjaan di Indonesia untuk memetakan kebutuhan yang mereka perlukan ke depan. Saat ini sektor yang dinilai paling siap adalah pariwisata.

Akses dan mutu sertifikasi bagi pekerjaan di Indonesia saat ini sangat perlu untuk digenjut. Terdapat kasus di mana ahli ketenagalistrikan di Indonesia harus memilik sertifikat sebanyak 1600, sangat berbanding terbalik dengan negara lainnya yang hanya berkisar 10 sertifikat. Hal ini tentu sangat memberatkan tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan produktivitasnya.

Pemerintah mengajak masyarakat untuk optimis dalam menghadapi MEA. Seluruh rakyat dihimbau agar mau berpartisipasi dan mengambil manfaat yang tersedia agar Indonesia mampu menjadi bangsa yang unggul di pasar global.

- (2) **Ninasapti Triaswati.** Memberikan penjelasan bahwa MEA memiliki peluang dan tantangan. Bagi pemapar, MEA bermanfaat untuk memperluas pasar bagi produk Indonesia ke luar negeri, namun hal tersebut sangat bergantung terhadap peran pengusaha apakah mereka berkeinginan untuk berekspansi atau tidak. Secara statistik pengusaha Indonesia hanya sedikit yang mau bersaing dalam dunia internasional. Banyak dari pengusaha tersebut yang beranggapan bahwa pasar domestik masih jauh lebih potensial dibandingkan dengan pasar internasional.

Selain pasar produk, MEA juga bermanfaat bagi perluasan bagi pasar tenaga kerja. Isu utama dalam hal ini adalah nilai tambah yang rendah, sudah ada kemauan dan kemampuan pekerja Indonesia bersaing di pasar internasional, dan sebagian besar masih kurang berpendidikan. Fokusnya adalah bagaimana Indonesia bisa mengirim tenaga terampil di pasar internasional.

Tidak hanya hal positif saja, MEA juga memiliki dampak negatif bagi Indonesia. Hal itu antara lain persaingan pasar internasional yang sangat kompetitif. Untuk isu tenaga kerja persaingan pekerja di dalam negeri akan semakin ketat, khususnya untuk sektor-sektor tertentu yang lebih dahulu terbuka, misal pariwisata, perdagangan, jasa kesehatan/perawat, dan keuangan. Isu yang menjadi penting adalah masih sangat terbatasnya kebijakan non tarif bagi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia, seperti bahasa, pengalaman kerja, dan jenis pekerjaan.

Target keberhasilan MEA adalah surplus neraca pembayaran dan neraca pekerja. Intinya surplus di bidang perdagangan, jasa, dan modal. Selain itu targetnya adalah jumlah dan kualitas pekerja Indonesia yang meningkat (semakin produktif).

Secara umum Indonesia harus meningkatkan kualitas pekerja domestik melalui pendidikan dan memiliki sertifikasi kompetensi pekerja dalam negeri sesuai dengan benchmark Indonesia. Selain itu Indonesia juga harus memperkuat sistem informasi pekerja dari tingkat pusat hingga daerah karena sistem yang ada pada saat ini masih sangat lemah dan belum terkordinasi dengan baik. Indonesia juga perlu untuk memperkuat kebijakan Non-Tariff bagi produk Indonesia maupun pekerja Indonesia. Seperti misalnya SNI dan standar pekerja yang sesuai dengan budaya Indonesia.

- (3) **Muhamad Iksan.** Bagi pembicara MEA adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Optimisme tentu menjadi kunci penting, akan tetapi kewaspadaan juga tidak boleh ditinggalkan. Dengan MEA Indonesia memiliki peluang yang tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi *supplier* bagi pasar Asia Tenggara.

Sayangnya, Indonesia pada saat ini tidak memiliki keunggulan yang menjadi ciri khas bagi bangsa untuk dikenal di pasar global. Untuk itu pemerintah perlu memetakan sektor apa yang harus menjadi fokus Indonesia dalam perdagangan internasional ke depan.

Bagi Iksan, pemberlakuan MEA tentu akan meningkatkan kompetisi pasar. Kompetisi tersebut sebenarnya adalah hal yang baik karena konsumen akan memiliki pilihan yang lebih variasi dibandingkan dengan pasar monopoli di mana masyarakat cenderung terpaksa dalam menentukan pilihan ekonominya.

FORUM DISKUSI

1. **Isniati Kuswini**, FEB UIN Jakarta, bagaimana Indonesia mengejar ketertinggalan untuk mampu berkompetisi di pasar ASEAN? Apa regulasi yang pada saat ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar ketertinggalan tersebut?

2. **Lili**, Sabda FKUB, bagaimana terobosan pemerintah terhadap bonus demografi yang akan dimiliki oleh Indonesia nanti? Bagaimana kebijakan pemerintah terkait petani dan nelayan?
3. **Aziz**, PSHK, kebijakan apa yang sudah diambil oleh pemerintah untuk menghindari TKI yang berpergian secara ilegal? Apakah UU Ketenagakerjaan perlu direvisi dan pada isu apakah yang harus menjadi perhatian?

Tanggapan :

1. **Hanif Dhakiri**, Menaker, MEA memang mengerikan namun amat bermanfaat bagi Indonesia. Untuk itu kita perlu optimis dalam menghadapi MEA agar memperoleh manfaat yang tersedia. Di sektor industri misalnya, daya saing akan bertumpu pada harga yang murah, produksi yang cepat, dan kualitas yang baik. Untuk mendorong industri agar berdaya saing tinggi saat ini sayangnya masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Salah satu yang menjadi tantangan tersebut adalah dilematis pemilihan antara meningkatkan daya saing dan pertumbuhan industri padat modal. Untuk itu strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan akses dan mutu balai latihan tenaga kerja. Pelatihan kerja menjadi kunci penting, tetapi semua pihak harus mendukung terlaksananya program tersebut.

Terkait bonus demografi Indonesia dapat belajar dari Korea Selatan, di mana dalam menghadapi bonus tersebut Indonesia sangat memerlukan peta kebutuhan. Sayangnya peta tersebut belum tersedia di seluruh sector yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Menaker pada saat ini sedang membuat cetak biru ketenagakerjaan di Indonesia.

Terkait UU Naker, kita memerlukan cara pandang baru terhadap UU tersebut. Terkait revisi yang diinginkan saat ini pemerintah sedang menyiapkan rencana pembahasan tersebut, yang akan dilaksanakan dari daerah hingga pusat.

Perihal UU TKI (UU 39), Menaker justru menginginkan UU yang baru. Seperti pada hal penempatan di mana yang sebelumnya adalah objek, menjadi subjek. Peran negara di sana adalah melindungi pilihan yang diambil oleh masyarakat itu sendiri.

2. **Ninasapti**, TII dan Ekonom UI, yang paling penting bagi Indonesia saat ini adalah kebijakan dan implementasinya. Proses sertifikasi yang dijalankan di Indonesia, seperti bahasa, sangat formalitas sekali. Hal yang sangat penting justru dilewatkan saja oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Riset yang dilakukan oleh pembicara di Korea menunjukkan bahwa hamper keseluruhan TKI di sana hanya mengikuti ujian secara formalitas dan cukup membayar paket tertentu kepada oknum tertentu.

Terkait bonus demografi sebenarnya yang menjadi poin penting adalah konsistensi. Pemerintah bebas memilih negara mana yang menjadi contoh bagi memanfaatkan bonus demografi, namun yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu konsisten terhadap kebijakan bonus demografi yang pemerintah akan jalankan.

3. **Iksan**, Suara Kebebasan, konsistensi kebijakan pemerintah sangat perlu dilaksanakan di tengah kondisi yang ada saat ini. Peran masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk mengawal isu-isu yang penting bagi kebijakan ketenagakerjaan Indonesia.

Catatan :

1. **Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di**
[http://www.theindonesianinstitute.com/category/pendidikan-publik/the-indonesian-forum-
pendidikan-publik/](http://www.theindonesianinstitute.com/category/pendidikan-publik/the-indonesian-forum-pendidikan-publik/)
2. **Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".**

TERIMA KASIH